



LAPORAN HASIL PENELITIAN

PARTISIPASI PEMILIH

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG DALAM PEMILU

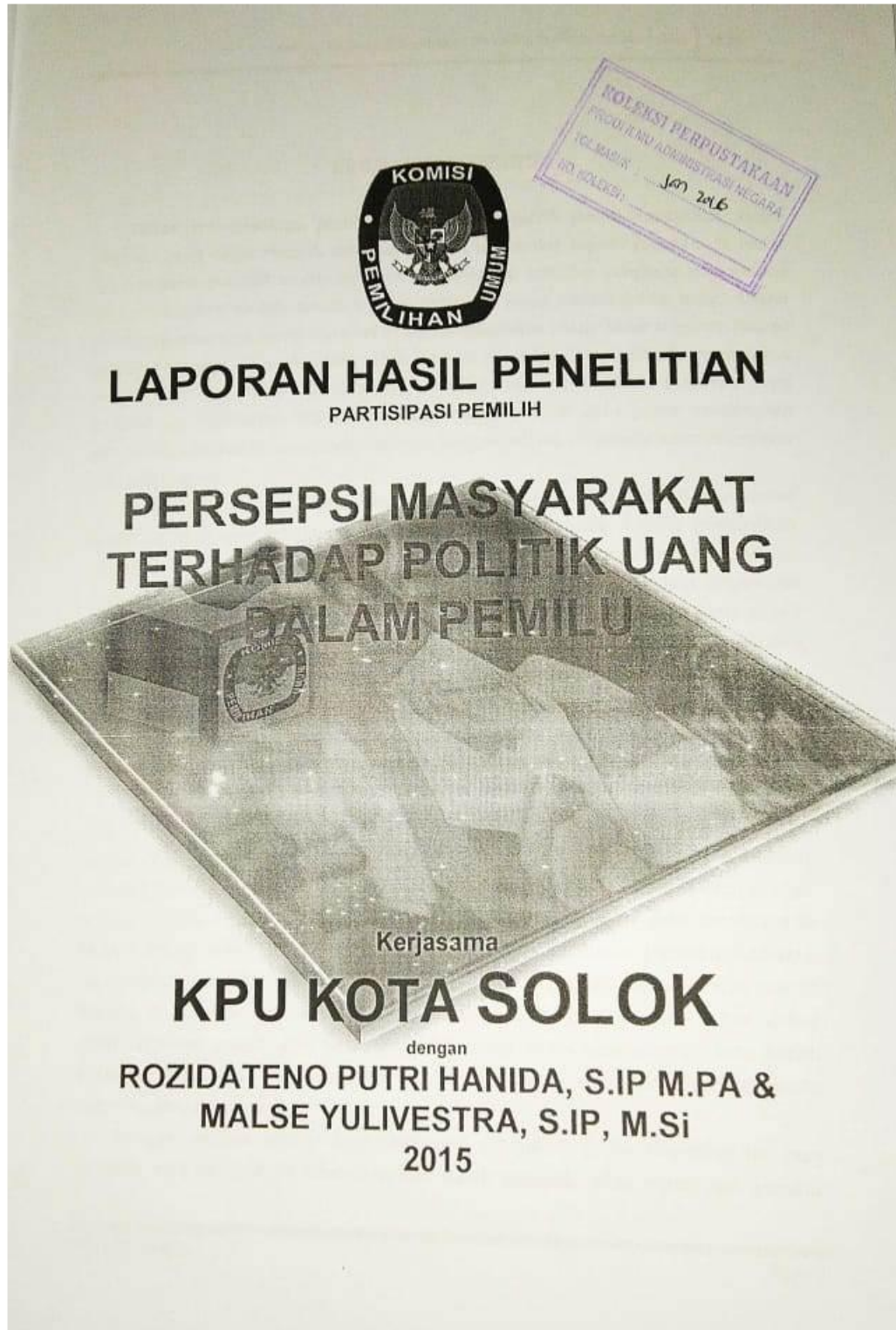
Kerjasama

KPU KOTA SOLOK

dengan

**ROZIDATENO PUTRI HANIDA, S.IP M.PA &
MALSE YULIVESTRA, S.IP, M.Si**

2015



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam era demokrasi, pemilu sebagai praktik politik praktis merupakan faktor penting yang dapat menjadi instrumen kontrol masyarakat kepada penguasa. Dalam penyelenggaraannya pemilu menghabiskan cukup besar dari anggaran belanja negara. Tentunya dana yang besar tidak menjadi persoalan jika pemilu diselenggarakan dengan jujur dan bebas dari kecurangan sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas. Data yang diungkap ICW 2014, kecurangan-kecurangan pemilu selalu didominasi politik uang.

Praktek politik uang ini membahayakan setiap elemen bangsa, tentunya persoalan itu harus diupayakan pencarian solusi untuk mengurangi praktek politik uang tersebut. Dalam konteks seperti itu untuk bisa mengetahui bagaimana politik uang itu terjadi, pola politik uang seperti apa, KPU mengembangkan sebuah kegiatan ilmiah yang berbasis riset. Riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap praktek politik uang dalam penyelenggaraan PEMILU, dan merumuskan solusi kebijakan untuk mengurangi praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode eklaktif, yaitu menggabungkan dua metode penelitian, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar ada ruang yang lebih luas bagi peneliti untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap politik uang. Mengingat keberadaan politik uang yang selalu disebut sebagai rahasia umum, artinya tidak ada orang yang ingin dengan sangat polos menceritakan bahwa dirinya adalah “pelaku” politik uang dalam pemilu. Kerahasiaan praktek politik uang ini di ketahui oleh publik, akan tetapi pada saat itu publik juga tidak ingin bercerita banyak tentang bagaimana dan seperti apa pola politik uang yang mereka terima dalam penyelenggaraan pemilu, alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner terstruktur dengan wawancara langsung, yaitu enumerator bertatap muka langsung dengan responden.

Dengan Kriteria responden dalam penelitian ini adalah: Usia minimal 17 tahun dan atau sudah menikah, Sehat rohani dan jasmani, Berdomisili di kota Solok yang berdasarkan KTP, bukan anggota TNI/POLRI aktif penelitian ini menetapkan jumlah responden sebanyak 100 (seratus) orang responden.

Survei ini dilakukan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap praktek politik uang dalam pemilu menghasilkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Partisipasi politik masyarakat tidak terpengaruh oleh politik uang, yaitu dari hasil survey diketahui bahwa sebanyak 77 responden atau 77% menyatakan bahwa mereka

akan tetap menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu meskipun tidak ada calon yang memberikan politik uang kepada mereka. Sementara itu sebanyak 17 orang responden menyatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan hak suaranya dan sisanya sebanyak 6 orang tidak menjawab.

2. Hasil survey menunjukkan bahwa sebanyak 85 responden atau 85% menyatakan bahwa praktek politik uang dalam pemilu tidak dibenarkan.
3. Menurut responden praktek politik uang terjadi pada pagi hari saat menjelang pencoblosan, dan sebagian lain dari responden menjawab pada masa kampanye terbuka dan juga terjadi pada masa kampanye tertutup
4. Sebagian besar responden atau sebanyak 86 orang responden menyatakan setuju dan memiliki keinginan agar terbebas dari praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara itu hanya 1 orang responden yang tidak menginginkan pemilu itu bersih dari praktek politik uang dan sisanya sebanyak 7 orang responden tidak peduli dan 6 responden tidak menjawab.
5. Menurut responden praktek politik uang hanya dapat diatasi jika setiap pihak konsisten dengan penegakan hukum, dan harus bersumber dari kesadaran masyarakat dan juga peserta pemilu untuk tidak lagi menerima dan membagi-bagikan uang disaat pemilu.
6. Sikap diam responden menghadapi praktek politik uang di pengaruhi karena faktor tdak ada sanksi yang tegas bagi mereka yang menerima atau memberi uang dalam praktek politik uang.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, oleh karenaNya maka laporan Penelitian Partisipasi Masyarakat Persepsi Masyarakat Terhadap Isu Politik Uang dalam PEMILU tahun 2015 dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan gambaran persepsi, tingkat pemahaman, sikap dan kecenderungan sikap dan perilaku masyarakat dalam PEMILU terhadap praktek politik uang, termasuk upaya mencari solusi untuk menghapus dan atau minimal menurunkan prkatek politik uang tersebut.

Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi alat untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman dan ekspektasi masyarakat terhadap pemilu yang bebas dari praktek politik uang dan membantu kinerja KPUD sebagai penyelenggara pemilu dalam upaya mewujudkan sistem control yang baik bagi penguasa.

Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa kekurangan yang terjadi, hal itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki. Oleh sebab itu masukan dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian maupun pembuatan laporan penelitian. Secara khusus terimakasih untuk KPU Kota Solok dan masyarakat Kota Solok yang telah berkenann memberikan informasi sebagai responden dalam penelitian ini.

Kiranya kerjasama yang telah terjalin dapat terbangun lebih baik dan efektif lagi dalam rangka upaya mewujudkan masyarakat yang peduli dalam praktek negara demokrasi.

Peneliti

Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA

& Malse Yulivestra, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
1. PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Pertanyaan Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Metode Pengumpulan Data	8
1.4.2 Lokasi Penelitian	8
1.4.3 Kriteria Dan Jumlah Responden	8
1.4.4 Pelaksanaan dan Waktu Penelitian	9
1.5 Pelaporan	10
2. KARAKTERISTIK RESPONDEN	11
3. PENGETAHUAN DAN KESADARAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILU	17
4. PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT	21
5. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK POLITIK UANG	23
6. KESIMPULAN	42
6.1 Kesimpulan	42
6.2 Rekomendasi	42

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menyelenggarakan PEMILU adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi pada dasarnya adalah sistem bernegara yang didasarkan pada paradigma bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat dimaknai dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga pemimpin di pilih dari dan oleh rakyat.

Sehingga pemilu tersebut menghantarkan proses transisi kepemimpinan. Dan dalam penyelenggaraannya pemilu tersebut membutuhkan pembiayaan. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislative pada tahun 2014 menghabiskan anggaran negara yang cukup lumayan, yaitu dengan pagu anggaran 1.608.545.705.000, yang terealisasi sebesar 52,48% yaitu sebesar 844.142.178.629. Dan itu tentunya belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon dalam berkampanye, yang tentunya dana yang mereka keluarkan tidak lah kecil.

Dana yang besar tidak menjadi persoalan jika pemilu diselenggarakan dengan jujur dan bebas dari kecurangan sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas. Data yang diungkap ICW 2014 Kecurangan-kecurangan pemilu selalu didominasi politik uang.

Praktek politik uang ini membahayakan setiap elemen bangsa, tentunya persoalan itu harus diupayakan pencarian solusi untuk mengurangi praktek politik uang tersebut. Dalam konteks seperti itu untuk bisa mengetahui bagaimana politik uang itu terjadi, pola politik uang seperti apa, KPU mengembangkan sebuah kegiatan ilmiah yang berbasis riset.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Politik Uang dalam PEMILU?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap praktek politik uang dalam penyelenggaraan PEMILU
2. Merumuskan solusi kebijakan untuk mengurangi praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang.

1.4 Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian peneliti menggunakan metode eklaktif, yaitu menggabungkan dua metode penelitian, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar ada ruang yang lebih luas bagi peneliti untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap politik uang. Mengingat keberadaan politik uang yang selalu disebut sebagai rahasia umum, artinya tidak ada orang yang ingin dengan sangat polos menceritakan bahwa dirinya adalah “pelaku” politik uang dalam pemilu. Kerahasiaan praktek politik uang ini di ketahui oleh publik, akan tetapi pada saat itu publik juga tidak ingin bercerita banyak tentang bagaimana dan seperti apa pola politik uang yang mereka terima dalam penyelenggaraan pemilu.

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan di wilayah kerja KPUD Kota Solok, yang meliputi dua kecamatan di Kota Solok, yaitu Kecamatan Lubuak Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. Pengumpulan data primer dalam penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan responden (bertatap muka). Alat bantu yang digunakan dalam wawancara langsung ini adalah kuesioner terstruktur.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kota Solok, yang terdiri dari dua Kecamatan, yaitu kecamatan Lubuak Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan.

1.4.3 Kriteria Dan Jumlah Responden

Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

1. Usia minimal 17 tahun dan atau sudah menikah
2. Sehat rohani dan jasmani
3. Berdomisili di kota Solok yang berdasarkan KTP
4. Bukan anggota TNI/POLRI aktif

Ada banyak rumus yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah sampel, dalam penelitian ini penghitungan dilakukan dengan pendekatan rumus Slovin.

Menurut rumus Slovin dalam Green (2000) penghitungan jumlah sampel dapat dilakukan dengan rumus:

$$n = \frac{N}{(1 + E^2)}$$

dimana :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

E = nilai *sampling error*

sehingga di dapatkan: $n = 46.498 / (1 + 46.498 (0.05)^2) = 100$

Dengan nilai N sebesar 46.498 juta jiwa dan nilai *sampling error* sebesar 0.1, diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 jiwa.

Dari penghitungan statistik tersebut terlihat bahwa jumlah minimum responden adalah 100. Dan dengan pertimbangan kebutuhan analisis, ketersediaan anggaran dan sumber daya, maka jumlah responden untuk penelitian ini ditetapkan minimal berjumlah 100 orang sesuai dengan hasil perhitungan tersebut.

1.4.4 Pelaksanaan dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan oleh Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA dan Malse Yulivestra, S.IP, M.Si yang dibantu oleh para enumerator di lapangan, yaitu oleh Cherry Amelia, Fahrul Rozi, Masruli, Adelin Putri, Diana Putri, dan Nugroho Wasispratama. Enumerator bekerja dan mengumpulkan data primer dan data skunder di lapangan. Penelitian dilakukan pada minggu ke dua juli hingga minggu ke 2 Agustus, yang didalamnya sudah termasuk kegiatan membuat laporan penelitian.

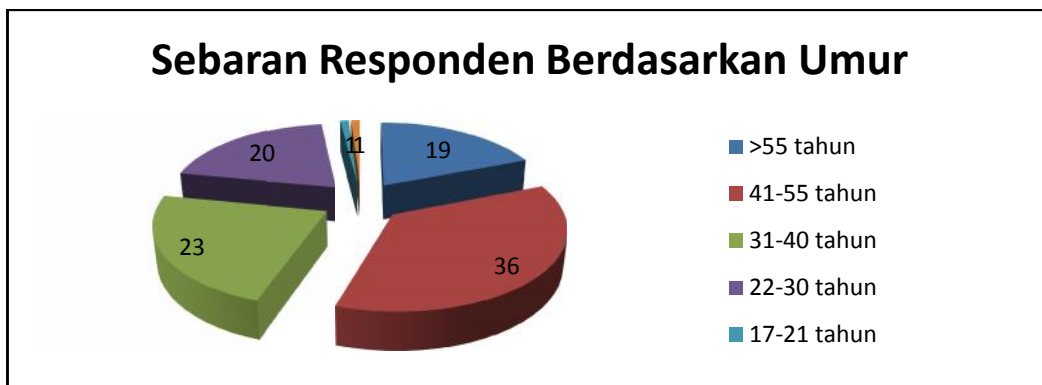
1.5 Pelaporan

Bentuk luaran dari penelitian ini adalah laporan penelitian. Data yang di kumpulkan di dua kecamatan di Kota Solok dikelompokan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

2 KARAKTERISTIK RESPONDEN

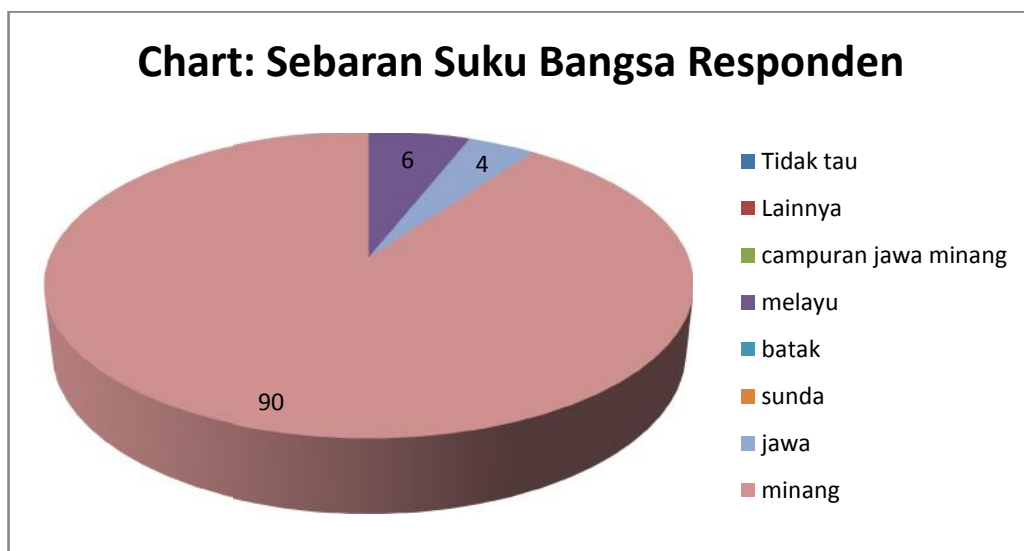
Jumlah responden dalam penelitian partisipasi pemilih, terkait persepsi masyarakat mengenai isu praktek politik uang dalam pemilu ini adalah 100 orang responden. Responden tersebut tersebar di dua kecamatan di Kota Solok, yaitu Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Lubuak Sikarah.

Ditinjau dari tingkat pendidikan terakhir responden dapat dilihat bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden adalah SLTA sederajat dengan jumlah 53 orang responden atau 53%. Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan terakhir kuliah diperguruan tinggi sebanyak 23 orang responden. Selanjutnya sebanyak 11 orang responden memiliki tingkat pendidikan setara dengan SLTP dan yang terakhir responden yang tidak pernah sekolah atau tamat sekolah dasar sebanyak 13 orang responden atau 13%. Responden tersebut tersebar di dua kecamatan di Kota Solok, dengan sebaran 60% di Kecamatan Tanjung Harapan dan 40% di kecamatan Lubuak sikarah. Pertimbangan sebaran ini dilakukan dengan analisa kualitatif, bahwa dari informasi dalam penelitian pendahuluan yang dikumpulkan bahwa di kecamatan Tanjung Harapan kasus praktek politi uang menjadi isu rahasia yang banyak diketahui oleh publik. Sehingga pertimbangan kuantitatif jumlah pemilih yang berbeda di kecamatan tersebut hanya dijadikan faktor lain untuk keseimbangan. Menurut umur reponden dalam penelitian ini tersebar seperti dalam grafik berikut.



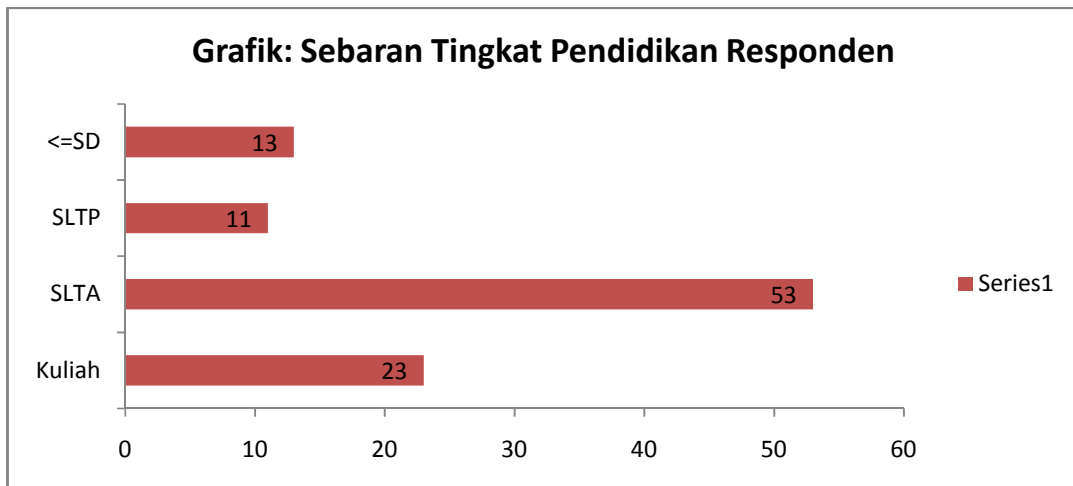
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa mayoritas usia responden yang disurvei sebanyak 100 orang adalah berada pada rentang usia antara 41-55 th dengan jumlah 36 responden atau 36%. Sementara itu sebanyak 23 responden atau 23% berada pada usia 31-40th dan pada rentang usia 22-30th sebanyak 20 orang responden atau 20%. Sedangkan selanjutnya usia responden dengan rentang lebih dari 55 tahun sebanyak 19 orang atau 19% dan sisanya yaitu pada rentang usia kecil dari 17 tahun tetapi sudah menikah dan antara 17-21th sebanyak 1 orang responden masing-masingnya.

Dilihat dari jenis kelamin responden, dalam penelitian ini yang menjadi responden dari 100 orang yang disurvei di Kota Solok terdapat sebanyak 71 orang responden atau 71% berjenis kelamin perempuan dan 29 orang responden atau 29% berjenis kelamin laki-laki. Yang tersebar ke dalam suku bangsa Minang, Melayu dan Batak, seperti yang terlihat dalam grafik berikut.

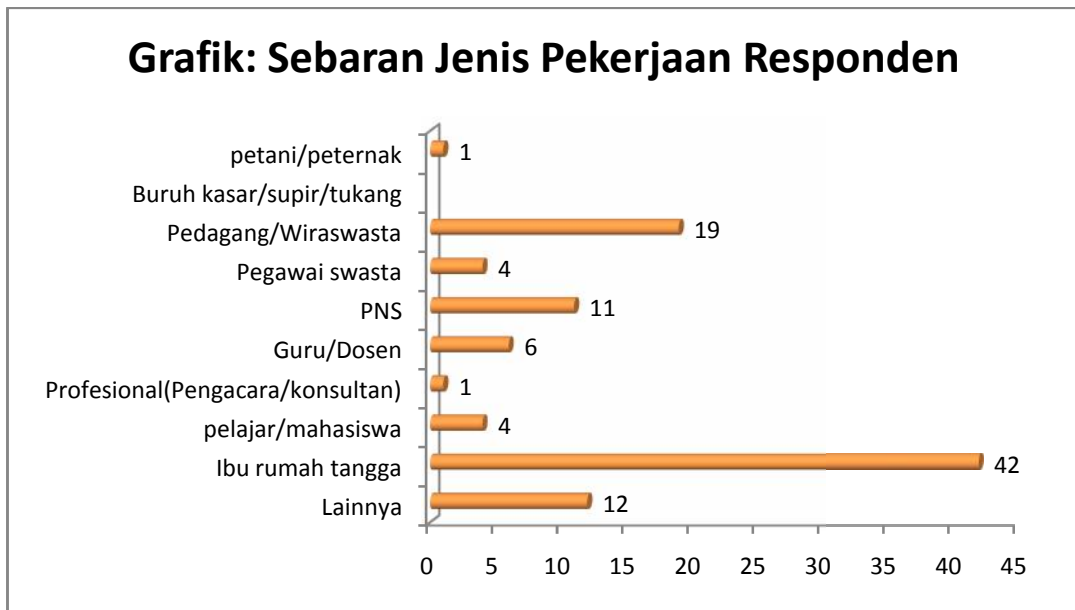


Suku responden yang ditemui dilapangan mayoritas suku adalah orang Minang yakni sebanyak 90 orang responden atau 90% dari total responden. Sementara itu suku-suku lain seperti suku Batak sebanyak 6 orang responden dan suku Jawa sebanyak 4 orang responden saja.

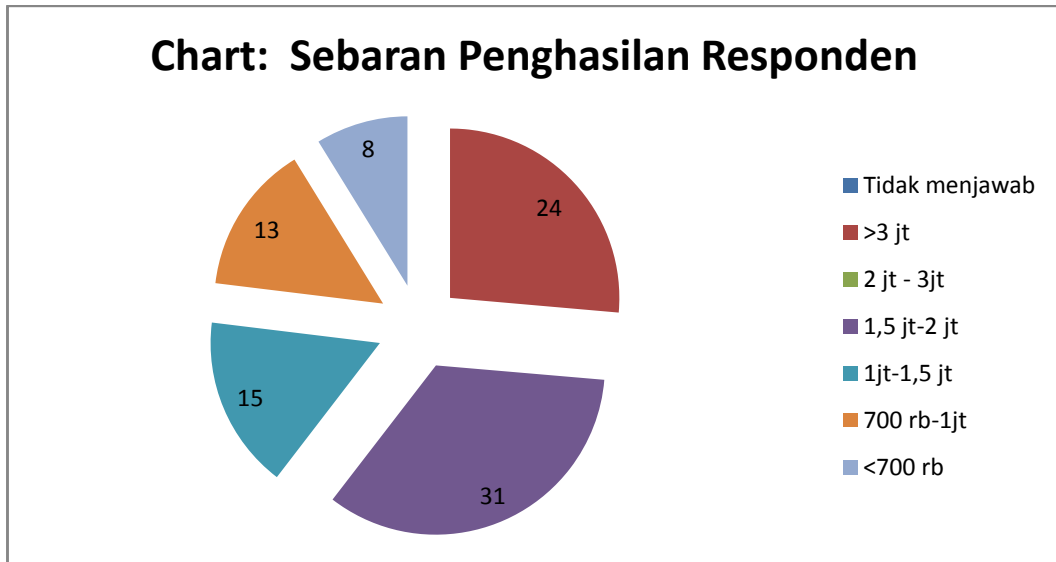
Ditinjau dari tingkat pendidikan terakhir responden dapat dilihat bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden adalah SLTA sederajat dengan jumlah 53 orang responden atau 53%. Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan terakhir kuliah diperguruan tinggi sebanyak 23 orang responden. Selanjutnya sebanyak 11 orang responden memiliki tingkat pendidikan setara dengan SLTP dan yang terakhir responden yang tidak pernah sekolah atau tamat sekolah dasar sebanyak 13 orang responden atau 13%.



Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Kota Solok ditemukan jenis pekerjaan responden memiliki keragaman. Kebanyakan responden yang disurvei berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga yakni sebanyak 39 orang dari seratus responden yang disurvei. Selanjutnya adalah responden dengan jenis pekerjaan PNS/Guru yakni sebanyak 18 orang atau 18 %. Sementara itu pada urutan selanjutnya adalah responden dengan jenis pekerjaan wiraswasta sebanyak 15 orang atau 15%. Sedangkan sisanya adalah responden dengan profesi sebagai pedagang sebanyak 5 orang atau 5%, 4 orang mahasiswa, 3 orang berprofesi sebagai pegawai swasta, dan 1 orang responden adalah bekerja sebagai petani. Sementara itu sebanyak 9 orang responden atau 9% memiliki profesi diluar kriteria yang disebutkan diatas.



Dari sisi penghasilan rata-rata responden perbulannya dapat dilihat grafik yang disajikan dibawah. Dari tabel dapat kita lihat bahwa mayoritas responden memiliki rata-rata penghasilan perbulannya antara rentang 1,5jt – 2juta rupiah yakni sebanyak 31 responden atau 31%. Selanjutnya adalah responden yang berpenghasilan rata-rata antara 2 jt-3jt rupiah per bulannya yakni sebanyak 24 orang responden. Sedangkan responden yang berpenghasilan antara 1jt-1,5jt adalah sebanyak 15 orang responden dan yang berpenghasilan antara 700rb-1jt /sebanyak 13 orang responden. Hanya 9 orang dari responden yang memiliki penghasilan rata-rata diatas 9 juta perbulannya begitu juga dengan penghasilan dibawah 700rb hanya sebanyak 8 responden saja.



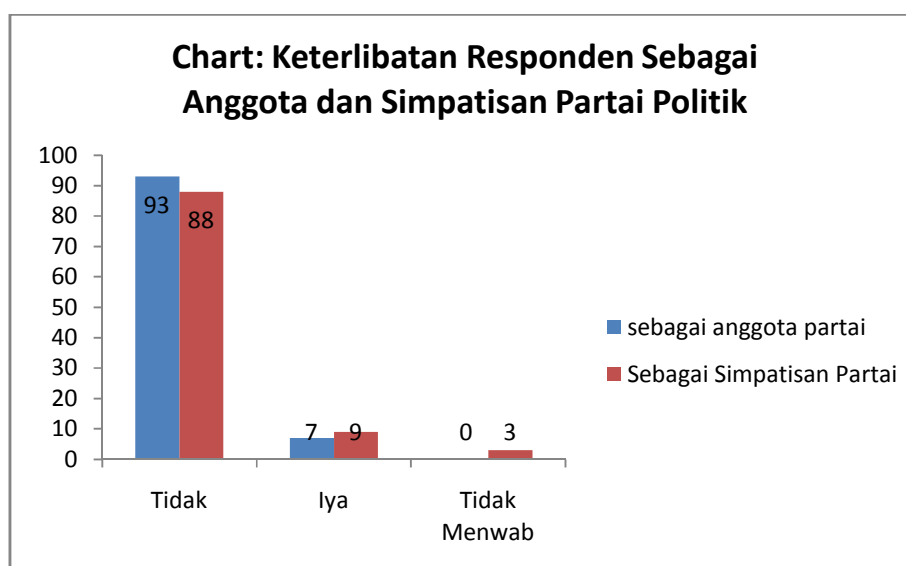
Karakteristik responden yang ditampilkan tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai kondisi nyata responden sehingga mempermudah dalam menganalisis hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap praktek politik uang dalam pemilu serta memberikan peluang untuk melakukan forecasting tentang kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk mengintervensi pada tahun-tahun berikutnya, sehingga praktek politik uang bisa dihilangkan.

3. PENGETAHUAN DAN KESADARAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILU

Untuk variabel pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait dengan partisipasi politik dalam pemilu dilihat dalam empat pertanyaan, yaitu mengenai ke ikutsertaan dalam pemilu, terdaftar sebagai anggota partai politik ataupun sebagai simpatisan partai politik, keterlibatan dalam pemilu 2014 dan kerelaan dalam menyalurkan hak pilih dalam pemilu 2014. Jawaban dari pertanyaan survey terkait ke-4 hal tersebut menggambarkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam PEMILU. Berdasarkan survey di lapangan dapat dideskripsikan bahwa terkait dengan keikutsertaan dalam Pemilu dimana responden yang ditemui di lapangan sebanyak 100 orang menyatakan bahwa semuanya atau sebanyak 100% dari mereka pernah mengikuti Pemilu atau pemilihan umum.



Data lapangan mengenai keikutsertaan atau keterlibatan dalam partai politik Dari 100 responden yang berhasil ditemui di Kota Solok dimana terkait dengan status mereka apakah terdaftar sebagai anggota di salah satu partai politik atau tidak dapat dilihat pada chart di bawah. Dapat dijelaskan bahwa mayoritas atau sebanyak 93 atau 93% responden menyatakan bahwa mereka tidak terdaftar dalam salah satu anggota partai politik yang ikut dalam pemilu. Sementara itu sisanya sebanyak 7 orang atau 7% responden menjawab bahwa mereka adalah anggota dari salah satu partai politik peserta pemilu. Sementara itu terkait dengan pertanyaan apakah responden merupakan simpatisan dari salah satu partai politik peserta pemilu dapat dijelaskan pada chart di bawah, bahwa sebanyak 88 orang responden atau 88% menjawab bahwa mereka bukan simpatisan dari salah satu partai politik peserta pemilu. Sementara itu sisanya sebanyak 9 orang responden atau 9 % menyatakan bahwa mereka adalah simpatisan dari salah satu partai politisi pemilu. Dan yang terakhir sisanya sebanyak 3 orang atau 3% responden tidak mau menjawab terkait dengan pertanyaan yang diberikan.



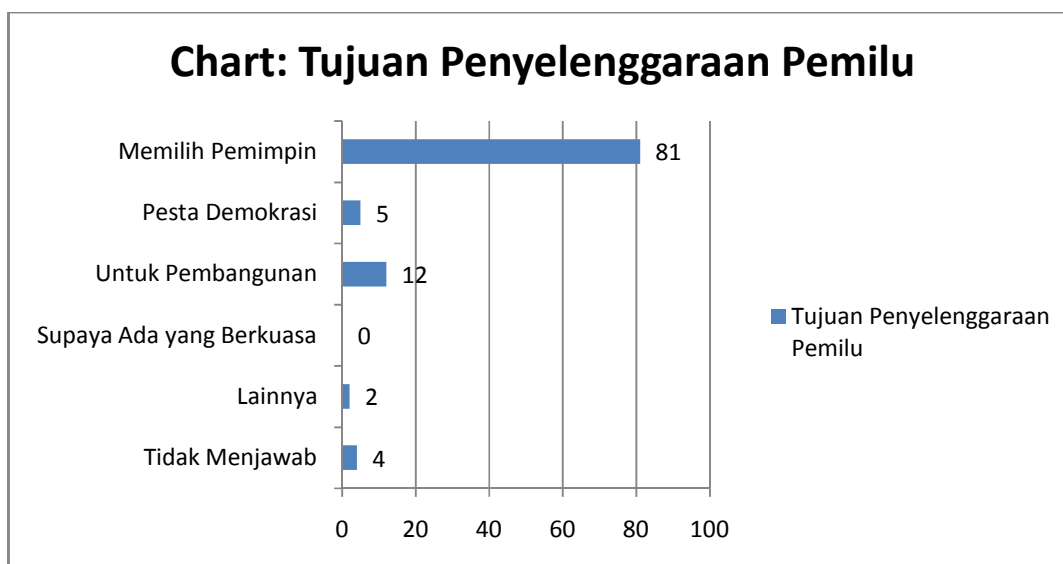
Jawaban atas pertanyaan ini menggambarkan kepada kita bahwa responden berada pada level partisipasi terendah, yaitu dengan ikut dalam pelaksanaan PEMILU, dan belum terlibat sebagai pengurus dalam partai politik, artinya responden bukanlah masyarakat politik, dengan menjadi aktif sebagai pengurus partai politik atau sebagai simpatisan partai politik tertentu.

Sedangkan untuk kerelaan responden dalam menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu yaitu dengan mencoblos pada pemilu 2014, dari 100 orang responden menjawab bahwa 98 orang atau 98% menjawab bahwa mereka menggunakan hak pilih mereka pada pemilu 2014 yang lalu. Sementara itu sisanya sebanyak 2 orang responden atau 2% menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu 2014 yang lalu. Seperti dalam chart di bawah ini:



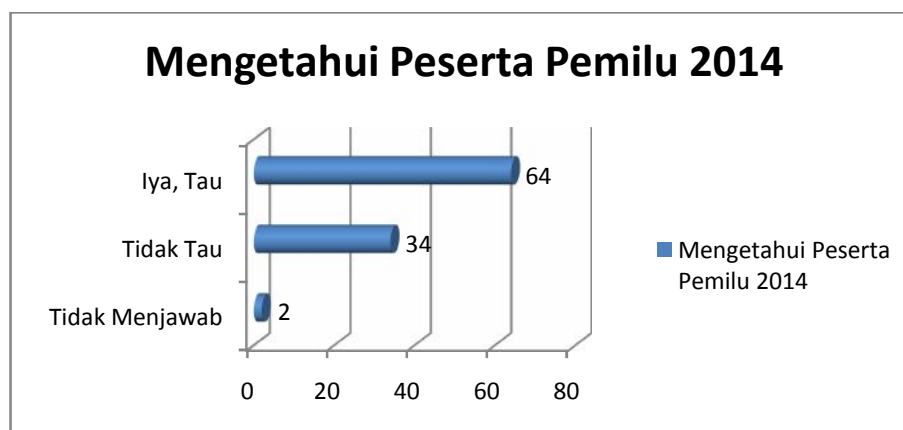
Sedangkan untuk pertanyaan tujuan dari penyelenggaraan pemilu dimana hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar atau bahkan mayoritas dari responden yakni sebanyak 81 orang responden atau 81% menyatakan bahwa tujuan diselenggarakannya

pemilu ini adalah untuk memilih pemimpin. Ini sesuai dengan tingkat pendidikan responden yang berada dalam level SMA ke bawah, sehingga pemahaman mereka masih cukup terbatas pada tujuan pemilu untuk memilih pemimpin saja, Sedikit diantara responden yang menjawab bahwa tujuan pemilu adalah untuk pembangunan, jawaban ini dipilih oleh responden sebanyak 8 orang atau 8%. Sementara itu sisanya sebanyak 4 orang responden atau 4% menjawab tujuannya adalah sebagai pesta demokrasi. Sementara itu responden yang tidak menjawab terdapat sebanyak 5 orang dan lainnya sebanyak 2 orang. Pertanyaan ini adalah untuk mendeskripsikan pengetahuan responden terhadap tujuan kegiatan Pemilu yang diikuti oleh responden. Kondisi ini member gambaran kepada kita bahwa partisipasi terendah yang di berikan oleh responden dengan hadir dalam pencoblosan masih belum di dukung dengan pengetahuan optimal responden terhadap tujuan PEMILU.



4 PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT

Untuk variabel perilaku memilih masyarakat dalam penelitian ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden ditujukan untuk mendeskripsikan apakah keputusan pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu. Kenapa seorang pemilih menjatuhkan pilihannya kepada peserta pemilu tertentu. Hasil di lapangan terkait pengetahuan responden terhadap peserta pemilu seperti digambarkan dalam chart berikut ini.



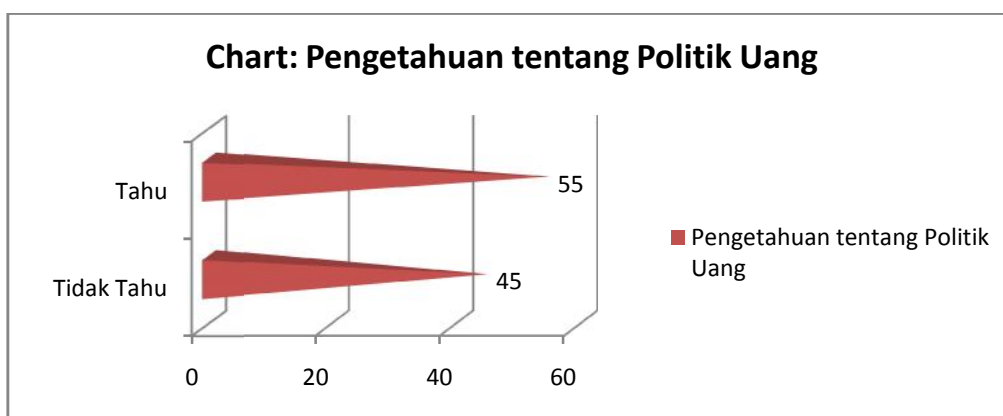
Bahwa sebanyak 64 orang responden atau 64% menyatakan bahwa mereka mengetahui peserta pemilu pada tahun 2014 yang lalu. Sementara itu sisanya sebanyak 34 orang responden atau 34% menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui peserta pemilu pada tahun 2014 yang lalu. Dan yang terakhir sebanyak 2 orang responden tidak menjawab. Kondisi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya responden memilih atau mencoblos dalam penyelenggaraan pemilu, tidak didasarkan pada pilihan rasional atas pengetahuan mereka terhadap peserta pemilu. Ditunjukkan dengan bukti

bahwa responden tidak tahu siapa yang menjadi peserta pemilu, kondisi ini rentan untuk mendapat intervensi mobilisasi dalam penyelenggaraan PEMILU.

Sumber pengetahuan mereka terhadap informasi penyelenggaraan pemilu mayoritas responden yakni sebanyak 47 orang responden atau 47% menjawab bahwa media elektronik televisi merupakan sumber informasi utama mereka dalam mengetahui informasi pelaksanaan pemilu. Jika dikaitkan dengan pekerjaan responden yang juga mayoritas adalah Ibu Rumah Tangga, yang dalam observasi peneliti sebahagian waktunya dalam mengurus rumah tangga cenderung untuk di samping dengan menonton televisi, maka ini adalah kondisi yang wajar sebagai sumber pengetahuan mereka akan pemilu adalah televisi. Sementara itu sebanyak 18 orang responden atau 18% menyatakan bahwa mereka mengetahui pelaksanaan pemilu ini melalui anggota KPU. Persentase yang tidak sangat rendah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa KPU telah sukses melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya sebanyak 16 orang responden menyatakan bahwa mereka mengetahui informasi mengenai pelaksanaan pemilu ini melalui tokoh masyarakat yang ada di daerah mereka. Sedangkan sebanyak 5 orang responden menjawab bahwa mereka mengetahui informasi pelaksanaan pemilu ini dari Kelurahan. Dan sisanya sebanyak 2 orang responden mendapatkan informasi melalui media cetak yaitu koran. Dan responden yang tidak menjawab sebanyak 3 orang dan lainnya sebanyak 9 orang.

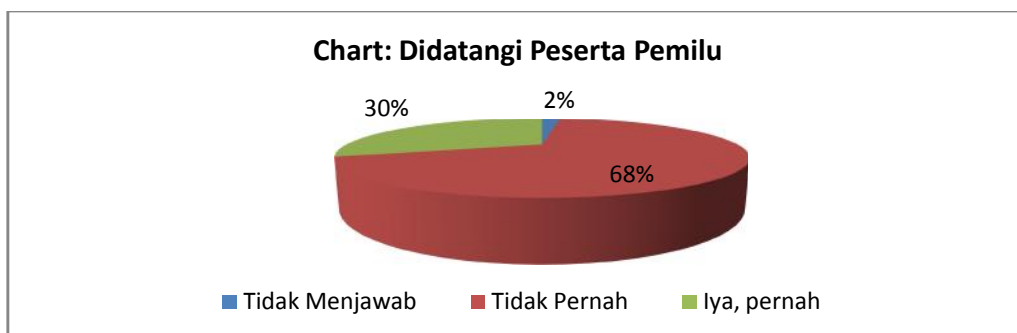
5 PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK POLITIK UANG

Menanyakan kepada responden tentang pengetahuannya terhadap politik uang di tujuan untuk bisa mendeskripsikan bahwa responden tahu atau mengenal politik uang. Data di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan responden terkait dengan politik uang cukup diketahui oleh sebagian besar responden. Hal ini terlihat dari hasil survey yang dilakukan bahwa dari 100 orang responden sebanyak 55 orang responden menjawab bahwa mereka mengetahui tentang politik uang. Sementara itu sisanya sebanyak 45 orang responden atau 45% menjawab bahwa mereka tidak mengetahui mengenai isu politik uang. Seperti yang tergambar dalam chart berikut.

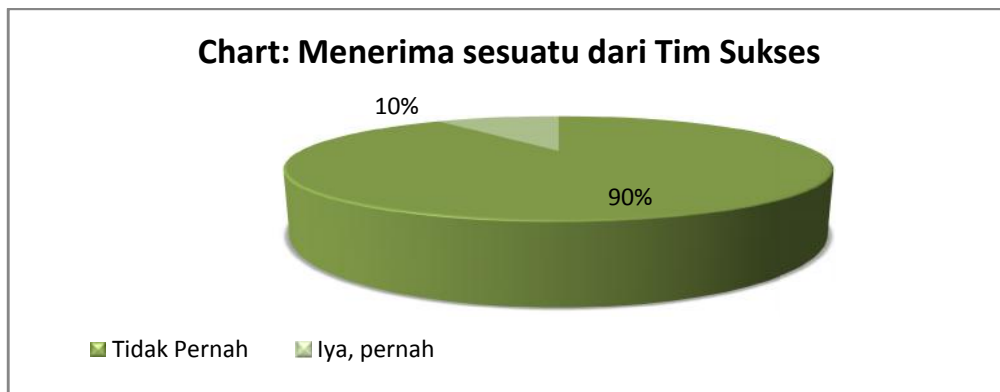


Kondisi pengetahuan responden terhadap politik uang tersebut di perdalam dengan mencari tahu tentang pola politik uang yang terjadi di tengah lingkungan responden. Melalui pertanyaan apakah Rumah responden pernah didatangi oleh peserta atau para kontestan pemilu. Bahwa responden yang disurvei sebagian besar mengatakan bahwa mereka selama pemilihan umum tidak pernah didatangi kerumahnya oleh peserta atau para kontestan pemilu. Ini terlihat dari data hasil survey yang mana dari 100 orang responden sebanyak 68 orang responden atau 68% menjawab bahwa mereka tidak pernah

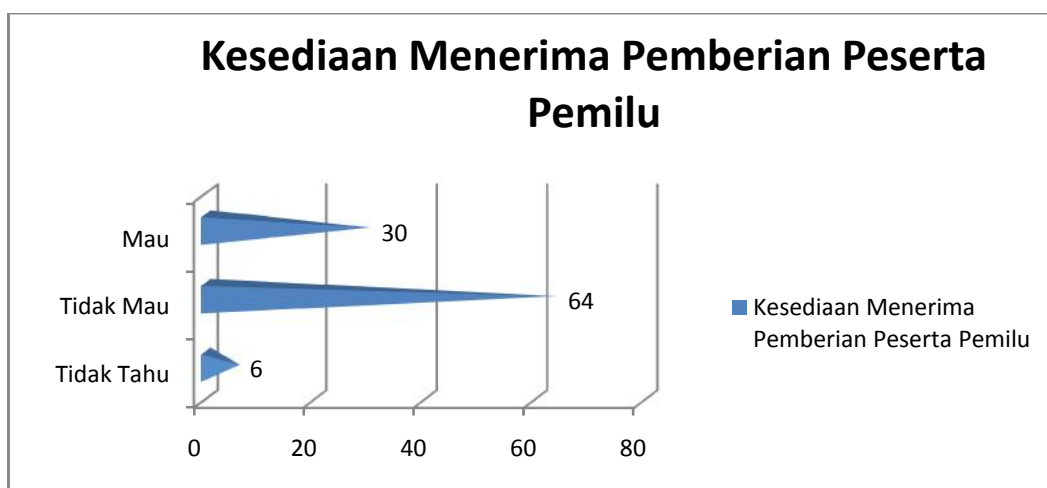
didatangi. Sementara sisanya sebanyak 30 orang responden atau 30% responden mengatakan bahwa mereka pernah didatangi oleh peserta pemilu kerumahannya. Sisanya sebanyak 2 orang responden tidak menjawab.



Fakta ini sebenarnya memberikan pertanyaan baru terhadap kita semua, apa yang di pahami Responden sebagai politik uang, dan seperti apa itu dilakukan. Ketika 68 persen responden menjawab bahwa rumahnya tidak pernah didatangi oleh peserta pemilu, ataupun dari tim sukses peserta pemilu. Dalam pendalaman melalui wawancara peneliti menemukan fakta bahwa benar adanya responden tidak didatangi kerumah-rumah oleh peserta pemilu dan atau oleh tim suksesnya, karena praktek politik uang terjadi melalui pendekatan tokoh. Hal itu terungkap ketika pengetahuan responden itu diperdalam dengan pertanyaan apakah menerima sesuatu pemberian dari tim sukses/peserta pemilu. Data di lapangan didapat bahwa sebanyak 90 responden atau 90% menjawab bahwa mereka tidak pernah menerima sesuai atau pemberian apapun dari tim sukses/peserta pemilu. Sementara itu sisanya sebanyak 10 orang responden atau 10% menjawab bahwa mereka pernah menerima sesuatu dari tim sukses/peserta pemilu.



Akan tetapi data ini agak berbeda ketika pengetahuan responden tersebut lebih digali dengan pertanyaan Apakah Ibu/Bapak/Saudara mau menerima pemberian (uang, barang dll) dari peserta pemilu? sebanyak 64 responden atau 64% responden menyatakan sikap bahwa mereka tidak mau menerima pemberian dari peserta pemilu baik itu berupa uang maupun barang. Sementara itu sebanyak 30 orang responden atau 30% menyatakan sikap bahwa mereka mau menerima pemberian itu dan sisanya sebanyak 6 orang responden tidak memberikan jawaban. Seperti yang digambarkan dalam chart di bawah ini.



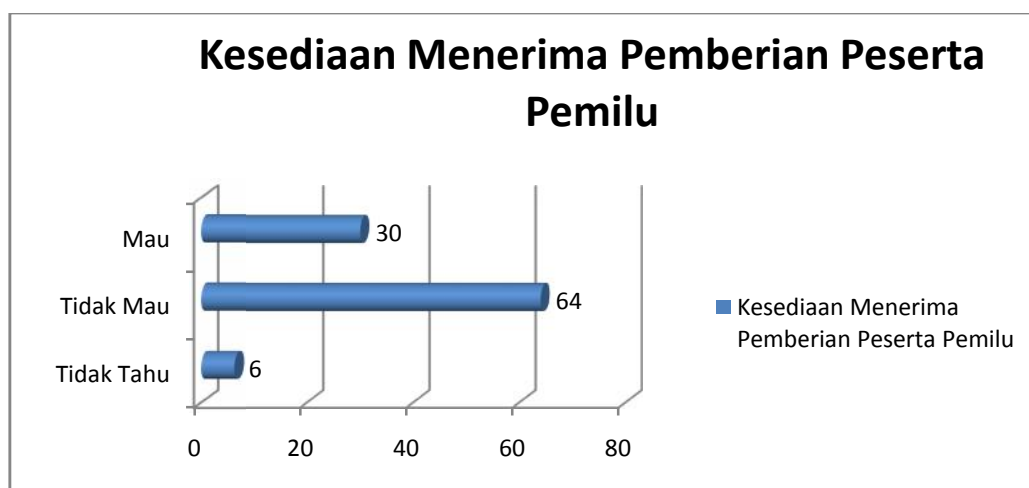
Ada hal yang berbeda terungkap di lapangan dari data kuantitatif, bahwa ketika 90% responden mengaku menjawab tidak pernah menerima sesuatu dari tim sukses, dan dari

sikap mereka terhadap pemberian dari tim sukses peserta pemilu adalah menjawab 30% mau menerima. Perbedaan nilai ini terungkap dengan alasan bahwa prinsipnya mau menerima sesuatu oleh tim sukses peserta pemilu, hanya dalam pemilu 2014 pemberian tim sukses itu lebih tidak tersalur kepada responden secara perseorangan, dari pengakuan responden dalam wawancara adalah bahwa pemberian dari tim sukses peserta pemilu itu di terima oleh perwakilan kelompok di lingkungan responden. Kalaupun ada yang didistribusikan langsung itu tidak bersifat merata pada setiap kepala keluarga. Dalam keterangannya seorang responden menjelaskan:

Kami ko sabananyo waktu itu namuah se menerima apa yang di berikan oleh tim sukses tu, tetapi mereka waktu itu ndak langsung mambagi-baginyo ka kami, mereka titip ka tokoh masyarakat di siko, ka urang-urang nan bapagaruah di lingkungan iko.

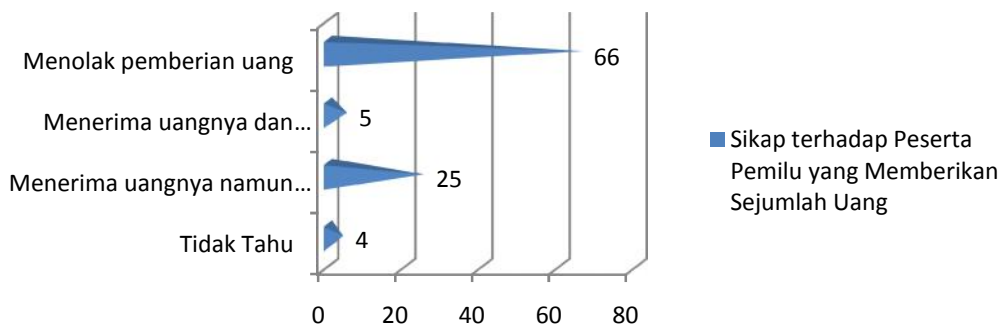
(kami sebenarnya waktu itu (waktu pemilu 2014;peneliti) mau saja menerima apa-apa yang diberikan oleh tim sukses peserta pemilu, akan tetapi tim sukses tersebut memilih memberikannya kepada tokoh masyarakat yang di nilai berpengaruh di lingkungan ini.)
(wawancara dengan responden).

Sementara itu sikap responden terhadap peserta pemilu yang memberikan uang kepada mereka dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari 100 orang responden sebanyak ditemukan bahwa sikap responden apabila ada yang memberikan sesuatu berupa (uang/barang) dari peserta pemilu adalah sebagai berikut: sebanyak 64 responden atau 64% responden menyatakan sikap bahwa mereka tidak mau menerima pemberian dari peserta pemilu baik itu berupa uang maupun barang. Sementara itu sebanyak 30 orang responden atau 30% menyatakan sikap bahwa mereka mau menerima pemberian itu dan sisanya sebanyak 6 orang responden tidak memberikan jawaban.



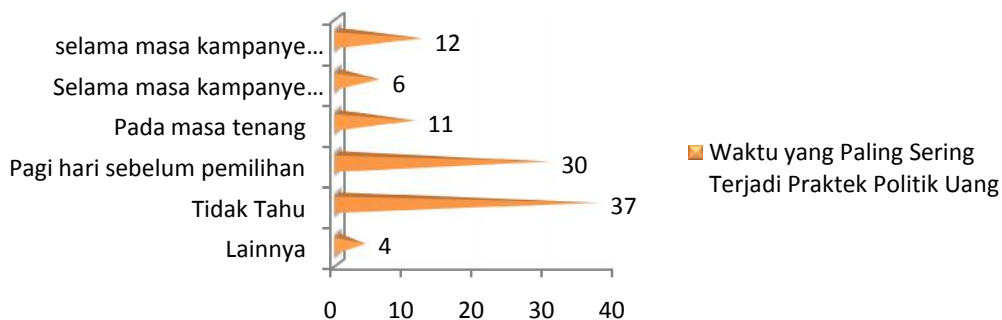
Data lainnya adalah tentang sikap responden terhadap peserta pemilu memberikan uang. Dari 100 orang responden sebanyak 66 orang responden atau 66% menyatakan sikap bahwa mereka menolak pemberian uang oleh peserta pemilu. Sementara itu sebanyak 25 responden menyatakan sikap lain yakni mereka akan menerima uang yang diberikan oleh peserta pemilu namun tetap akan memilih calon yang sesuai dengan hati nuraninya. Hanya 5 orang responden yang menyatakan bahwa mereka akan memilih peserta pemilu yang memberikan uang kepadanya. Dan sisanya sebanyak 4 orang responden tidak memberikan jawaban. Sebaran jawaban responden ini memberikan gambaran kepada kita, bahwa kesediaan sebahagian kecil responden yaitu sebesar 5% untuk menerima pemberian dari tim sukses peserta pemilu di pengaruhi oleh kondisi ekonomi responden. Responden dengan pendapatan perbulan tidak lebih dari satu juta rupiah memilih untuk menerima pemberian dari tim sukses peserta pemilu. Sejumlah 25% responden menjawab bahwa akan menerima uang dari tim sukses peserta pemilu namun akan tetap memilih sesuai dengan hati nurani, hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan latar belakang pendidikan responden.

Sikap terhadap Peserta Pemilu yang Memberikan Sejumlah Uang



Selama di lapangan peneliti seringkali mendapat jawaban yang tidak konsisten dari responden, bahwa ketika responden mengetahui tentang politik uang, mengaku tidak mau menerima politik uang, tapi menjelaskan bahwa yang menerima adalah tokoh perwakilan yang ada di lingkungan responden, ini harus dipahami bisa yang ditimbulkan dari wawancara tentang topik yang sangat riskan. Setiap orang sangat ingin menyembunyikan tentang politik uang, akan tetapi setiap orang mengetahuinya.

Waktu yang Paling Sering Terjadi Praktek Politik Uang



Sementara itu terkait dengan waktu yang paling sering digunakan oleh tim sukses/ peserta pemilu untuk melakukan praktek politik uang sebagai besar menjawab tidak

tahu/tidak menjawab yakni sebanyak 37 orang responden atau 37%. Selanjutnya responden yang menjawab pada pagi hari sebelum pemilihan sebanyak 30 orang responden atau 30%. Sedangkan responden yang menjawab pada masa kampanye terbuka sebanyak 12 orang responden atau 12% dan pada masa tenang ada sebanyak 11 orang responden atau 11%. Sementara itu sisanya selama masa kampanye tertutup sebanyak 6 orang responden. Terakhir lain-lain sebanyak 4 orang responden saja.

Terkait dengan cara tim sukses melakukan praktek politik uang masing-masing responden memberikan jawabannya sesuai dengan tabel diatas. Dari tabel diatas dapat sebanyak 29 orang responden atau 29% menjawab bahwa cara yang digunakan oleh tim sukses/peserta pemilu melakukan praktek politik uang dengan langsung datang kerumah-rumah. Sedangkan sebanyak 12 responden atau 12% menjawab bahwa sebelum saat mencoblos dan hanya 9 orang responden yang menjawab pada saat kampanye. Ada 2 orang responden menjawab bahwa cara melakukan praktek politik uang itu dilakukan melalui ketua Rt/tokoh masyarakat dan 12 orang responden menjawab sebelum waktu pencoblosan, sedangkan 45 orang responden yang menjawab lainnya. Yang dalam wawancara itu terungkap melalui cara membelikan bahan bangunan bahkan ada yang berjanji untuk melunasi kredit kendaraan bermotor.

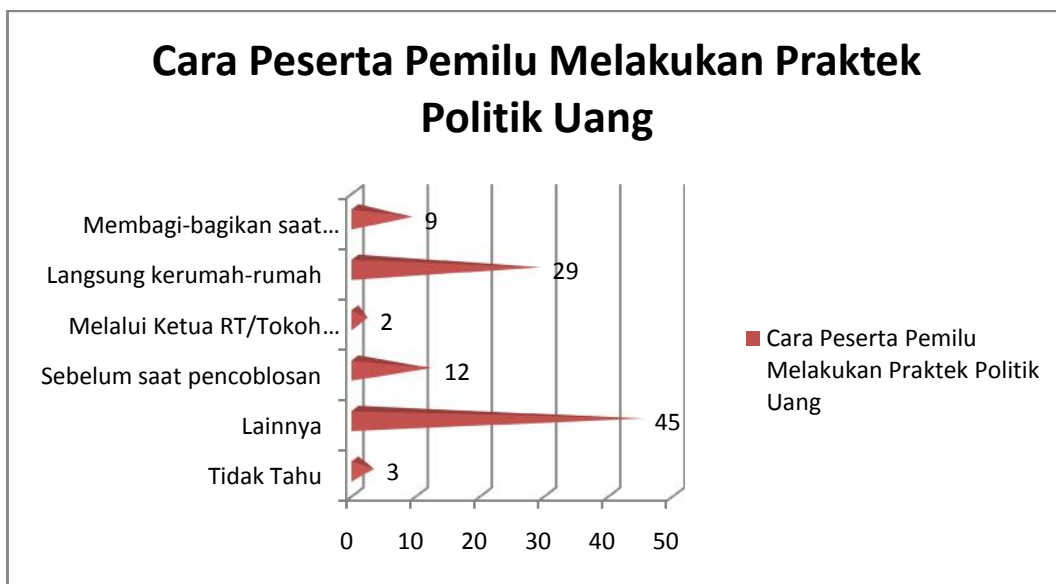
Jawaban responden ini bertolak beakang dengan pertanyaan yng sebelumnya dibahas pada bahagian depan lapoan ini, yaitu responden menjawab bahwa rumah mereka tidak pernah didatangi oleh tim sukses peserta pemilu. Kondisi yang bertolak belakang ini sangat besar pengaruhnya karena praktek politik uang ini bersifat rahasia yang di katehui oleh publik. Dalam sebuah kutipan wawancara responden menyampaikan bahwa.

Lai ndak baa wak ditanyo-tanyo mode iko go diak? Lai ndak kadikaruangan awak go?

“apa tidak apa-apa jika saya ditanya seperti ini? Apa saya tidak akan dimasukkan dalam karung (diperlakukan buruk;peneliti)

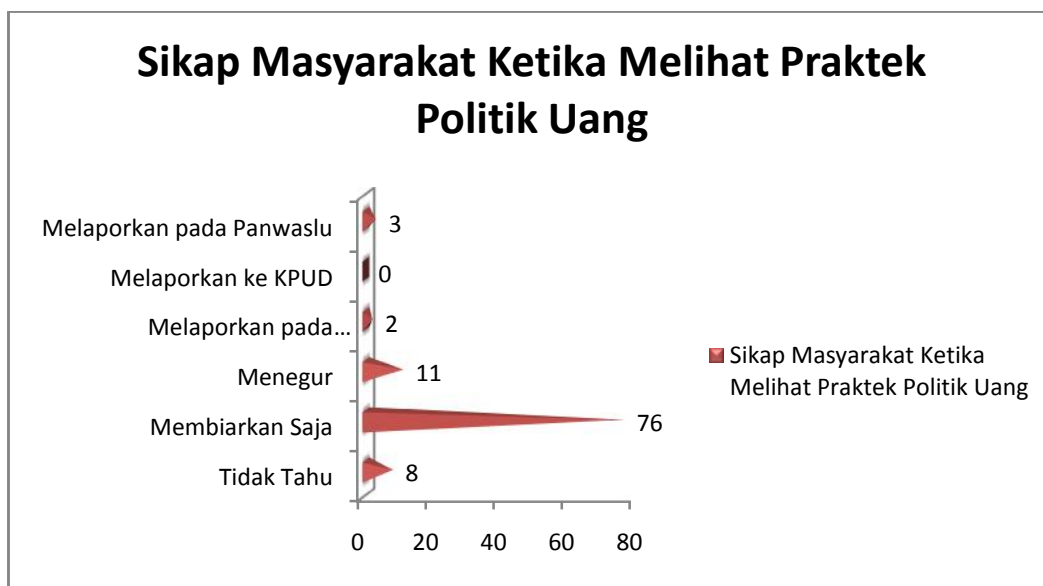
Dan selama proses pengumpulan data di lapangan cukup banyak responden yang tidak mau diwawancara, atau mau diwawancara akan tetapi setelah tau bahwa ini banyak bertanya tentang politik uang calon responden merasa harus membatalkan proses wawancara, dan tidak mengizinkan datanya dicatat. Akan tetapi peneliti merasa perlu mendeskripsikan kondisi ini, walaupun itu didapat dari mereka yang bukan responden. Ini adalah hasil observasi terhadap *gesture* dan mimik wajah, keengganan orang di wawancara karena menganggap ini isu yng sebaiknya tidak dibicarakan.

Sedangkan mengenai cara tim sukses melakukan praktek politik uang masing-masing responden memberikan jawabanya sesuai dengan chart di bawah. Dari chart berikut dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yakni sebanyak 44 orang atau 44% menjawab tidak tahu/tidak mau menjawab. Sementara itu sebanyak 29 orang responden atau 29% menjawab bahwa cara yang digunakan oleh tim sukses/peserta pemilu melakukan praktek politik uang dengan langsung datang kerumah-rumah. Sedangkan sebanyak 12 responden atau 12% menjawab bahwa sebelum saat mencoblos dan hanya 9 orang responden yang menjawab pada saat kampanye. Ada 2 orang responden menjawab bahwa cara melakukan praktek politik uang utu dilakukan melalui ketua Rt/tokoh masyarakat dan hanya 4 orang responden yang menjawab lainnya.



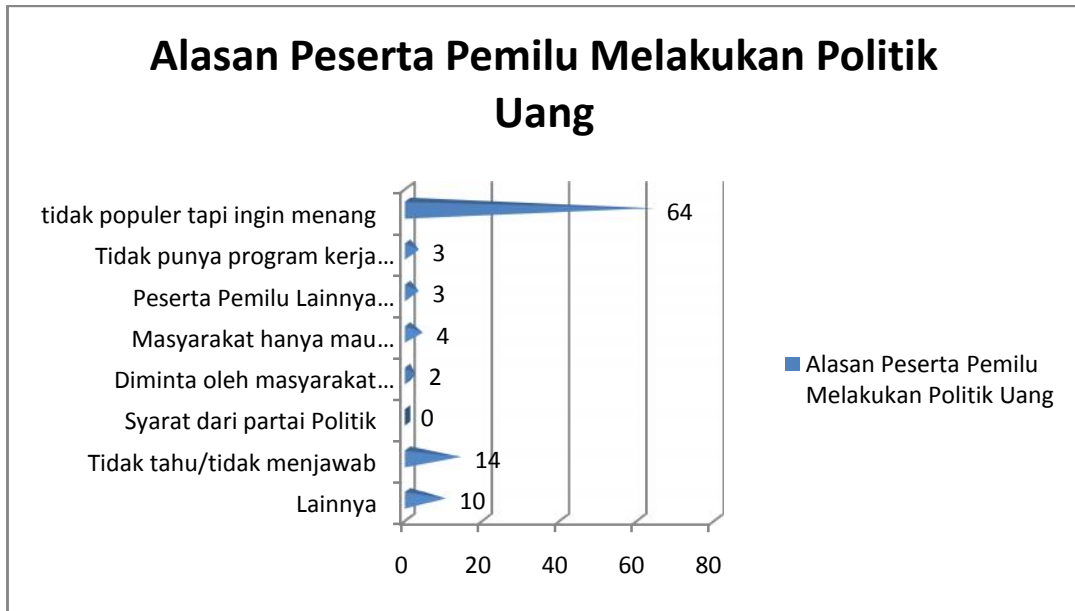
Sikap malu-malu responden dalam mengungkap cara yang dilakukan tim sukses peserta pemilu dalam melakukan praktek politik uang adalah juga untuk mengamankan keberadaan responden sendiri, agar tidak dikategorikan sebagai penerima politik uang. Responden menyangkal bentuk pertanyaan pernah menerima praktek politik uang, akantetapi dengan pengetahuannya responden mampu mendeskripsikan dimana dan kapan saja praktek politik uang biasa terjadi.

Terkait dengan sikap responden apabila mereka mengetahui adanya praktek politik uang. Sebagian besar responden atau sebesar 76 orang responden mengatakan sikap mereka yakni dengan membiarkan saja atau pura-pura tidak tahu dengan praktek politik uang tersebut. Sementara itu hanya 11 orang responden atau 11 % yang mau menegur langsung praktek politik uang tersebut. Hanya ada 3 responden yang mau melaporkan kasus proaktek politik uang yang terjadi kepada Panitia Pengawas Pemilu PANWASLU dan 2 orang responden yang mau melaporkannya ke instansi pemerintah. Sisanya sebanyak 8 orang responden tidak mau menjawab.



Ini menggambarkan kepada kita dengan tingkat pengetahuan dan kekhawatiran yang tinggi dari responden terhadap ancaman yang mungkin dapat mengenai dirinya responden memilih untuk membiarkan saja praktek politik uang. Selain itu faktor pendidikan responden sangat berpengaruh terhadap kondisi ini.

Terkait dengan motivasi atau alasan dari tim sukses/peserta pemilu melakukan praktek politik uang menurut responden adalah bahwa peserta tidak populer tapi ingin menang. Jawaban ini paling banyak yakni sebanyak 64 orang responden atau 64%. Sedangkan sebanyak 14 orang responden menjawab bahwa mereka tidak tahu alasannya. Hanya 4 orang responden yang berpendapat bahwa masyarakat hanya mau memilih jika diberi uang. Sedangkan yang memilih alasan bahwa mereka tidak punya program tapi ingin menang dan peserta pemilu lainnya juga melakukan hal yang sama masing-masing sebanyak 3 orang responden. Terakhir sebanyak 2 orang responden menjawab bahwa masyarakat pemilih yang memintanya.



Jawaban responden ini sekali lagi memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya responden paham dan mengerti mengapa terjadi praktek politik uang, hanya responden tidak mau dan menolak mendeskripsikan bentuk-bentuk praktek politik uang yang mereka terima, dengan alasan bahwa itu akan mengganggu kenyamanan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang responden:

“beko kami jawek ka adiak, apo-apo se dulu nan kami tarimo, adiak sanang dapek carito kami, tapi beko kami susah, walaupun cek adiak iko kadirahasiokan, tapi kini ko apo-apo ko batalingo diak, jadi beko kami nan susah.”

“ketika kami jawab, apa-apa saja yang dulu kami terima, adek (peneliti;pen) senang karena mendapatkan banyak cerita, tetapi kami (reponden;pen) yang akan susah. Apa-apa sekarang bisa mendengar, jadi nanti kami yang susah.

Sikap responden yang mendiamkan praktek politik uang salah seorang responden menjelaskan;

“Nyo ka mode iko juo nyo diak, jadi mode apo pun awak akan malapor ndak akan ado perubahan doh, dari ateh tu bana nan lah rak, kok iyo ka didibarasiahkan nan di bawah ko, barasiahkan bana dulu dari ateh. Kok indak bia selah mode iko, kok ado nan bagi-bagi pitih pas pemilu, kok dapek awak di tarimo, kok ndak dapek wak antok se pulo. Kini ko kok malapor-lapor wak mako ka susah, rancak di biaan sajo.”

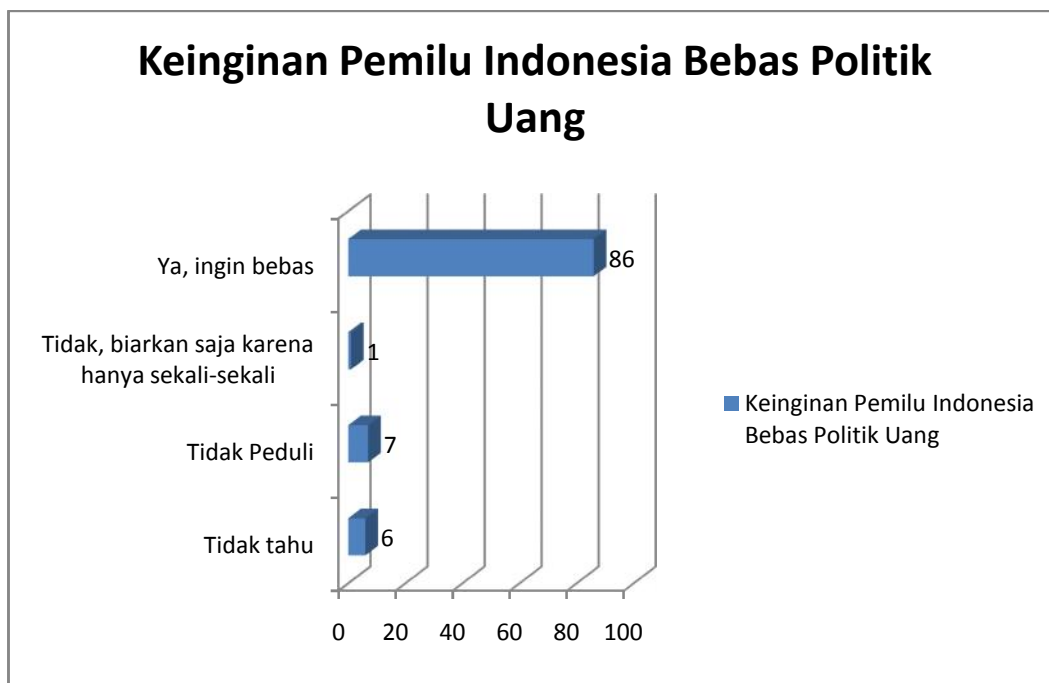
Apapun akan seperti ini juga, seperti apapun masyarakat melapor kondisinya tidak akan berubah, karena kondisi seperti ini terpengaruh oleh kondisi di atasnya. Jadi kalau mau membersihkan (menghapus praktek politik uang;pen) maka yang perlu di bersihkan pertama adalah yang bagian atas, jika tidak biarkan saja seperti ini. Jika ada orang yang bagi-bagi uang saat pemilu, kalau kita dikasih ya diterima, kalau ndak dikasih ya diamankan saja. SSekarang ini malah ketika kita melapor maka yang melapor akan menjadi susah, maka sebaiknya biarkan saja.

Gambaran itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa responden pesimis terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi. Sehingga responden memilih untuk diam, dari pada harus direpotkan oleh keadaan.

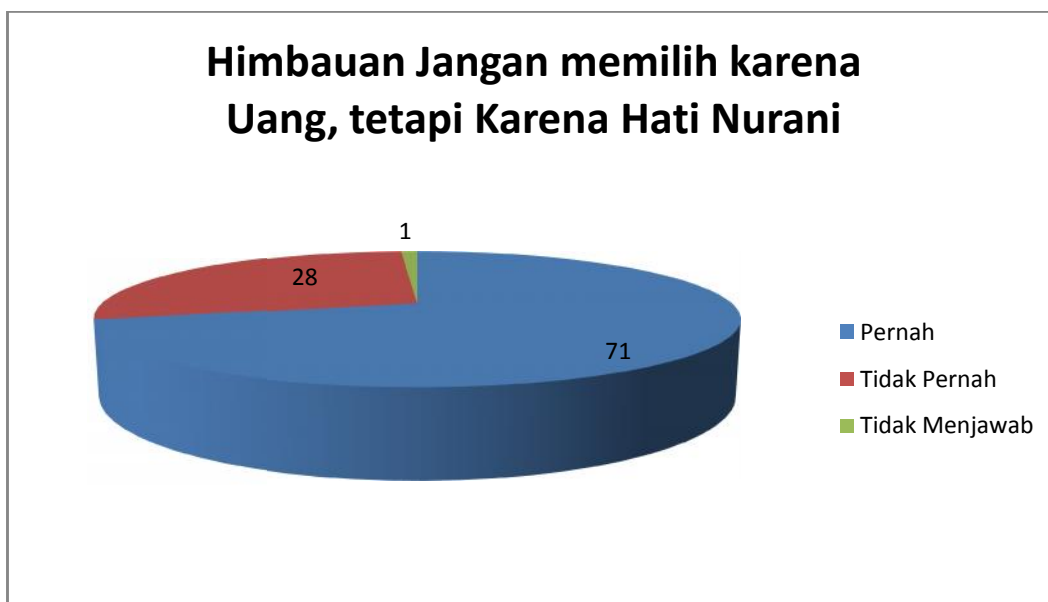
Sementara itu mengenai sikap responden jika tidak ada calon peserta pemilu yang memberikan politik uang apakah mereka akan tetap menggunakan hak pilihnya atau tidak. Dari hasil survey diketahui bahwa sebanyak 77 responden atau 77% menyatakan bahwa mereka akan tetap menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu meskipun tidak ada calon yang memberikan politik uang kepada mereka. Sementara itu sebanyak 17 orang responden menyatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan hak suaranya dan sisanya sebanyak 6 orang tidak menjawab.



Jawaban responden tersebut menjelaskan kepada kita, bahwa kesadaran responden untuk berpartisipasi dalam pemilu tidak dipengaruhi oleh politik uang. Masyarakat cenderung berada dalam posisi menerima. Dan untuk sikap dan keinginan dari responden terkait dengan pelaksanaan pemilu yang bersih dan bebas dari praktek politik uang dapat dijelaskan dari chart di bawah. Sebagian besar responden atau sebanyak 86 orang responden menyatakan setuju dan memiliki keinginan. Sementara itu hanya 1 orang responden yang tidak menginginkan pemilu itu bersih dari praktek politik uang dan sisanya sebanyak 7 orang responden tidak peduli dan 6 responden tidak menjawab.

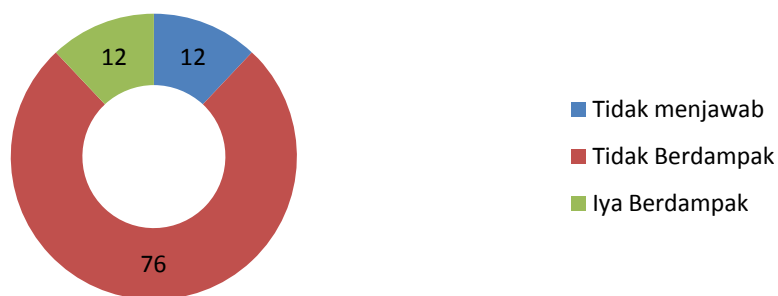


Tentunya keinginan responden untuk pemilu yang bebas dari praktek politik uang, harus didukung dengan sistem yang baik, dengan melakukan inovasi. Sehingga masyarakat tidak lagi bersikap apatis terhadap kondisi tersebut. Dalam strategi untuk bebas dari politik uang yaitu himbauan untuk jangan memilih karena uang tapi pilih dengan hati nurani ini sebagian besar responden yang disurvei menjawab bahwa mereka pernah mendengar slogan tersebut. Adapun jumlah responden yang menjawab pernah ini sebanyak 71 orang responden atau 71%. Sementara sisanya sebanyak 28 orang responden atau 28% responden menjawab tidak pernah tahu atau mendengar slogan tersebut dan sisanya 1 orang responden menjawab tidak tahu.



Ini menunjukkan kepada kita bahwa KPU sebagai penyelenggara ataupun pihak lainnya sudah mencoba mengkampanyekan agar menolak politik uang. Tapi sebagai sebuah transaksi, dimana ada permintaan pada saat itu disediakan barang, maka praktek politik uang masih terus terjadi. Sedangkan terkait dengan persepsi responden terhadap dampak politik uang itu haram sebagian besar responden menjawab tidak akan memiliki dampak. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey bahwa sebanyak 76 responden 76% menyatakan bahwa walaupun politik uang itu haram namun tetap tidak akan memiliki dampak yang positif. Sementara sisanya sebanyak 12 responden menyatakan bahwa hal ini akan berdampak. Sementara sisanya sebanyak 12 responden menjawab tidak tahu/tidak memberikan jawaban.

Dampak pernyataan politik uang haram pada hilangnya politik uang



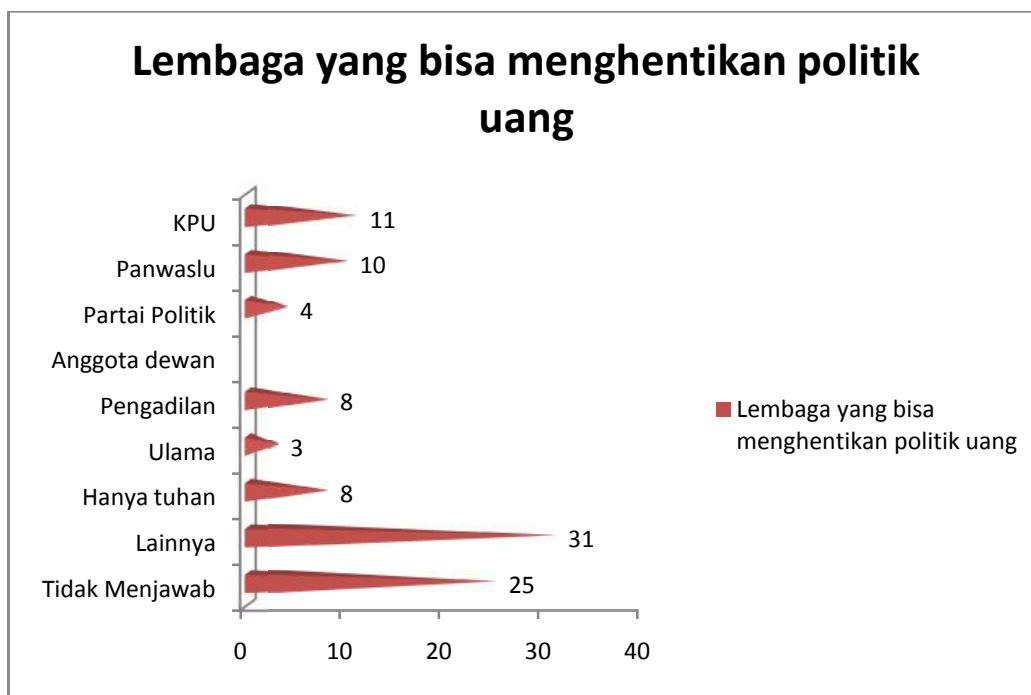
Bagi responden saat ini dengan pengatehuan bahwa politik uang itu salah dan tidak bisa di biarkan. Tetapi apapun bentuk himbauan agar poltik uang di hapuskan, akan tetap sulit, tidak berpengaruh, karena bagi responden ini adalah konsewensi dari pemilu.

"Mode aa se ka mangecekan haram mah dia, pi yo lah haram juo mah, nyo kamo de iko juo mah, asa pemilu ju urang ado se nan kamambagi-bagi pitih ko mah".

Seperti apapun akan di katakan haram, padahal sekarang orang-orang itu tahu kalo ini haram, maka kondisinya kaan seperti ini saja, asalkan masih ada pemilu, makan akan terus ada orang yang membagi-bagikan uang.

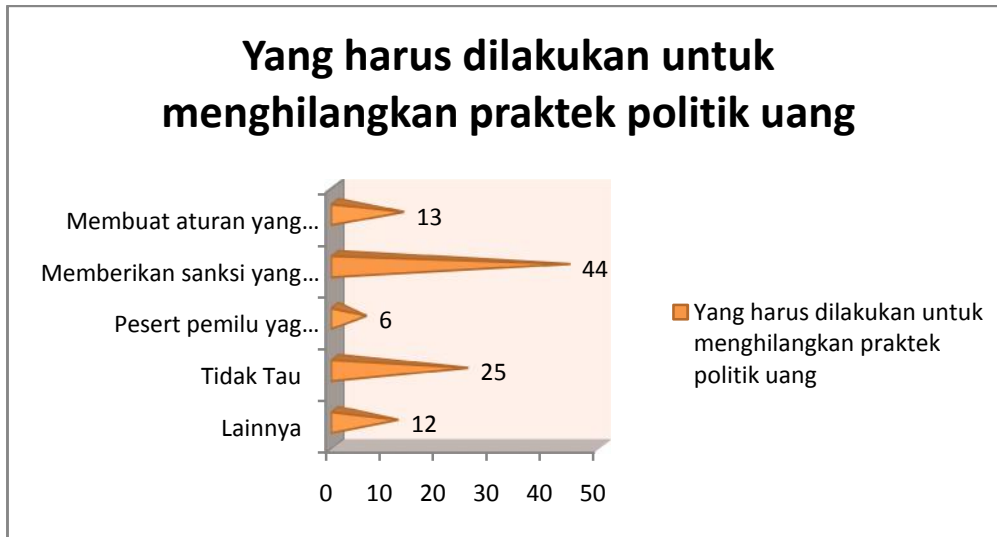
Mengenai pertanyaan siapakah yang bisa menghentikan praktek politik uang yang terjadi pada pemilu ini bisa dilihat dari chart di bawah. Dapat dijabarkan bahwa mayoritas responden justru menjawab lainnya sebanyak 30 responden atau 30%. Sementara itu yang tidak menjawab sebanyak 25 responden atau 25%. Sementara KPU dan Panwaslu hanya sebanyak 11 dan 10 responden. Sementara Tuhan dan pengadilan hanya dijawab oleh 8

orang responden. Sementara sisanya parta politik dan ulama masing-masing hanya dijawab orleh responden sebanyak 4 orang saja.



Pilihan responden menjawab diopsi lainya, yaitu menyebut bahwa polisi, dan diri masing-masing masyarakat dan peserta pemilu sendiri yang bisa merubah keadaan agar politik uang tidak lagi terjadi.

Mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk mengatasi praktek politik uang ini adalah sebagai berikut. Sebagian besar responden menjawab bahwa penyelenggara pemilu harus memberikan sanksi yang tegas pada peserta pemilu yang ketahuan melakukan praktek politik uang. Ini dijawab oleh 44 orang responden atau 44%. Sementara itu sebanyak 13 responden atau 13% menjawab bahwa penyelenggara pemilu harus membuat aturan yang jelas dan menegakkannya. Dan hanya 6 responden yang menjawab bahwa jika ketahuan maka hasilnya harus dibatalkan. Selanjutnya sebanyak 25 responden menjawab tidak tahu dan lainnya sebanyak 12 responden.



Pilihan responden dengan menjawab dengan memberikan sanksi yang tegas didasari dengan alasan bahwa selama ini menurut responden aturannya sudah ada, akan tetapi tidak dijalankan dengan baik. Seperti yang dijelaskan reponden dalam kutipan wawancara berikut:

“Nyo mode iko mah diak, aturan ko adoh, tapi yo tingga aturan se, atau aturan ko lah dilanggar se dek urang nan mambuek aturan, tamasuak hakim bagai, bara dek adiak nan malaporkan kejadian bagi-bagi pitih ko, tpi lai go adoh hukumannya bagi nan mangarajoan? Nyo tatap juo jadi presiden nyo, taap juo jadi anggota dewan nyo, malah dulu janjinyo banyak nah, malakik tapiliah, lah tapiliah ndak tantu dek nyo urang nan mamiliah nyo tu lai, jadi nan bisa maubah nyo, agiah hukuman ka urang nan babuek bantuak tu”.

“Kondisinya saat ini adalah bahwa aturan itu sudah ada, akan tetapi aturan malah dilanggar oleh orang yang membuat aturan, termasuk oleh hakim. Berapa banyak orang yang melaporkan kejadian bagi-bagi uang, akan tetapi apakah ada hukumannya bagi yang mengerjakan? Yang terpilih dan bagi-bagi uang itu tetap saja jadi presiden, jadi anggota dewan, malahan dulu janjinya banyak. Kondisi itu menjelang mereka terpilih saja, setelah itu mereka lupa

pada orang-orang yang telah memilihnya. Jadi yang bisa meubah mereka itu adalah mereka yang bagi-bagi uang itu di beri hukuman.

Penjelasan responden seperti dalam kutipan wawancara tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang lemahnya penegakan hukum. Dan seringnya terjadi pelanggaran hukum itu sendiri oleh orang-orang dianggap tahu tentang aturan hukum tersebut. Yang di butuhkan oleh masyarakat saat ini adalah kekonsistenan dalam menegakkan aturan.

6 KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

1. Keadaan pengetahuan tentang perlunya partisipasi dalam pemilu dan pentingnya pemilu untuk pembangunan harus selalu disosialisasikan kepada masyarakat, mengingat latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda dari masyarakat, maka proses pendidikan politik harus terus dilakukan.
2. Untuk kondisi masyarakat yang masih mencoblos dengan alasan yang tidak jelas, terukti dari belum dikenalnya peserta pemilu dengan baik oleh masyarakat, membuat masyarakat masih beranggapan bahwa pemilu hanya untuk memilih saja, tidak akan ada pengaruhnya untuk masyarakat.
3. Secara umum partisipasi politik masyarakat tidak terantung pada praktek politik uang. Namun kecenderungan praktek politik uang terjadi karena ada yang member uang dan membutuhkan uang.
4. Pengetahuan masyarakat yang beragam terhadap politik uang, melahirkan sikap yang beragam pula terhadap praktek politik uang tersebut, ada yang menolak ada yang menrima dan cenderung membiarkan praktek politik uang karena menganggap ini praktek ini sebagai sebuah transaksi, yaitu kondisi bayak yang meminta akan banyak yang menyediakan.
5. Politik uang terjad dalam segala kesempatan dan cara, yang bisa mengantisipasi agar praktek politik uang menurn adalah pengetahuan masyarakat dan penegakan hukum yang konsisten dengan memberikan sanksi yang tegas.

6.2 Rekomendasi

1. Penyelenggara pemilu harus membangun kerjasama yang baik dengan peserta pemilu untuk terus melakukan pendidikan politik yang akan menciptakan kesadaran tentang partisipasi, sehingga partisipasi masyarakat meningkat dengan mau terlibat dalam partai politik.
2. Partai politik harus konsisten melakukan pendidikan politik, dan sosialisasi sehingga tidak hanya hadir ke masyarakat pada saat pemilihan, agar pengetahuan dan pandangan masyarakat terhadap pemilu dan partai politik sebagai peserta pemilu bisa berubah.
3. Setiap elemen yang terkait dalam proses pengawalan penyelenggaraan pemilu yang baik dalam masyarakat yang demokratis harus menunjukkan kekonsistennannya dalam menegakan aturan hukum yang sudah ada.